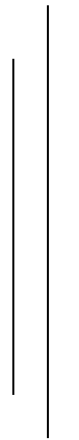


**RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA PADANG PANJANG**



**PADANG PANJANG,**

**2022**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan disertai indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra OPD. Penyusunan Rencana Kerja OPD dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap perumusan rancangan dan tahap penyajian. Proses penyusunan rancangan Renja OPD mengacu kepada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), hasil pengkajian terhadap kondisi eksisting OPD, dan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya. Selanjutnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi acuan dalam penyajian dokumen Renja.

Penyusunan Renja OPD mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selain itu penyusunan Renja OPD juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Melalui proses penyusunan secara terintegrasi ini diharapkan akan mampu mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, dan semakin terarahnya penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa Renja OPD dan RKPD merupakan bagian proses awal tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah dibidang keuangan Negara dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan daerah, serta pelayanan masyarakat, disusunlah rancangan KUA dan rancangan PPAS. Rancangan KUA dan rancangan PPAS ini dijadikan dasar untuk penyusunan RKA SKPD.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sebagai salah satu OPD yang membawahi 2 (dua) urusan wajib, urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Lingkungan Hidup, pada saat ini juga menyiapkan Renja Tahun 2023 yang memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Padang Panjang, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

## **1.2. DASAR HUKUM**

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Menetapkan prioritas pembangunan Tahun 2023 berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2023 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I      Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **Bab II      Hasil Evaluasi Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2021**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2021;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

#### **Bab III     Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
- 3.3. Program dan Kegiatan

#### **Bab IV     Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**

#### **Bab V      Penutup**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2021

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra OPD

Pengimplementasian Renja 2021 mengalami perubahan yang cukup signifikan, dipengaruhi oleh refocusing anggaran dan rasionalisasi target akibat Pandemi Covid 19. Refocusing anggaran telah dilakukan beberapa kali sesuai dengan arahan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah. Sementara rasionalisasi target dilakukan seiring dengan Perubahan APBD 2021.

Pada Tahun 2021 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menjadi salah satu OPD yang melaksanakan tugas dalam rangka Penanganan Covid 19. Peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah Pengelolaan Limbah B3 Covid 19 yang dihasilkan oleh beberapa Fasyankes dan fasilitas karantina Covid 19 yang disediakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021, LKPJ Tahun 2021 dan laporan realisasi APBD Tahun 2021, terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian. Selain itu dengan adanya Perubahan RPJMD yang diiringi dengan Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada Tahun 2021, telah dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja sasaran, program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Dari 11 program dan 19 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan yang dilaksanakan, capaian yang tidak memenuhi target umumnya terjadi pada outcome. Sementara untuk output hampir seluruhnya terealisasi 100%. Beberapa Program yang capaiannya dibawah target adalah :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Dari target Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan sebesar 28, 57% terealisasi sebesar 0%. Tahun 2021 ditargetkan 2 dari 7 sungai di Padang Panjang telah berstatus cemar ringan. Namun Tahun 2021 berdasarkan hasil uji dan pemantauan sumber pencemar, seluruh sungai di Padang Panjang masih berstatus cemar sedang, dengan kata lain tidak ada sungai yang berstatus cemar ringan (0%).

Di Tahun 2020 seluruh sungai sudah berstatus cemar sedang, sehingga indikator sebelumnya yaitu persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar sedang telah terealisasi 100%. Sehingga pada perubahan Renstra Tahun 2021 terjadi penyesuaian indikator menjadi persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan. Namun indikator ini belum bisa terealisasi karena 2 sungai yang di perkirakan bisa berstatus cemar ringan di Tahun 2021, ternyata masih berstatus cemar sedang.

Sungai yang masih berstatus cemar sedang ini menunjukkan masih tingginya pencemaran air sungai. Beberapa sumber utama yang berkontribusi pada pencemaran sungai-sungai di Kota Padang Panjang antara lain sektor domestik (rumah tangga), industri, pertanian/peternakan dan perdagangan. Pengelolaan limbah yang tidak memenuhi baku mutu dari masing-masing sektor menjadi penyebab utama pencemaran. Parameter uji yang paling tinggi tingkat cemarannya adalah *E coli* dengan konsentrasi mencapai ratusan bahkan ribuan kali lipat melebihi baku mutu. Bakteri *E coli* biasanya bersumber dari tinja manusia maupun kotoran ternak.

Tingkat pencemaran yang tinggi pada badan sungai sudah terdeteksi sejak dari bagian hulu yang berbatasan dengan wilayah kabupaten tetangga. Artinya dibutuhkan upaya penanganan yang menyeluruh, terpadu serta melibatkan semua stakeholder termasuk pengembangan kerjasama dengan daerah tetangga.

## 2. Program Pengelolaan Sampah

Dengan indikator Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan target 74% terealisasi sebesar 89,65%. Data realisasi yang lebih besar menunjukkan belum tercapainya target, karena penanganan sampah sesuai dengan Jakstrada Pengelolaan Sampah Kota Padang Panjang ditargetkan semakin meurun dari waktu ke waktu.

Hal ini juga menunjukkan bahwa volume sampah yang masuk ke TPA masih tinggi, yang berarti upaya pengurangan sampah dari sumbernya tidak terselenggara dengan baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain tidak berjalannya aktivitas pemilahan dan daur ulang sampah oleh masyarakat dan institusi. Kegiatan pembinaan masyarakat dalam pengolahan sampah selama Tahun 2021 tidak berjalan optimal. Tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kegiatan tersebut juga tidak bisa dilaksanakan karena adanya kebijakan *social* dan *physical distancing* akibat pandemi *Covid 19*.

. Beberapa Program yang telah memenuhi target adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan

Dengan indikator Rasio rumah layak huni dengan target 94,96% terealisasi sebesar 94,96%. Tercapainya target ini dipengaruhi oleh ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan Rusunawa dan Rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilakukan dari tahun ke tahun. Tahun 2021 terdapat 52 unit rehab rumah tidak layak huni yang diperoleh melalui dana DAK, dan tersedia 72 hunian di Rusunawa.

2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Dengan Target persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standar sebesar 86%, telah terealisasi sebesar 86%. Tercapainya target dipengaruhi oleh peningkatan kualitas PSU melalui kegiatan pemeliharaan jalan, dam dan drainase yang terus dilakukan setiap tahun di wilayah permukiman Kota Padang Panjang.

3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Dengan target persentase dokumen perencanaan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan telah terpenuhinya seluruh dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang harus dibuat pada Tahun yang bersangkutan. Untuk Tahun 2021 telah disusun 2 dokumen perencanaan lingkungan hidup yaitu dokumen KLHS RPJMD dan dokumen KLHS RTRW.

4. Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Dengan target persentase penyuluhan dan informasi lingkungan hidup sebesar 100% telah terealisasi sebesar 100%. Salah satu faktor yang menyebabkan tercapainya target yaitu dengan terlaksananya pembinaan dan penyuluhan terhadap kader lingkungan, dan telah ikut berpartisipasi kader lingkungan dalam melakukan penyuluhan lingkungan terhadap masyarakat di Kelurahan masing-masing.

5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup

Dengan indikator jumlah penghargaan di bidang Lingkungan Hidup, sebesar 0 jenis dan realisasi 0 jenis. Tahun 2021 karena adanya *pandemic Covid 19* tidak ada *event* penilaian



di tingkat Nasional, baik penilaian untuk Adipura maupun Adiwiyata yang dilaksanakan, sehingga tidak ada penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup yang diperoleh. Walaupun penilaian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak dilaksanakan, namun koordinasi terkait pengelolaan kebersihan dan lingkungan perkotaan berkelanjutan dan pendampingan terhadap sekolah-sekolah adiwiyata tetap dilaksanakan.

Beberapa Program yang telah melebihi target adalah sebagai berikut :

#### 1. Program Kawasan Permukiman

Dengan target persentase pengurangan kawasan kumuh sebesar 4,19% telah terealisasi sebesar 48, 80%. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 189 Tahun 2020, terdapat luas kawasan kumuh sebesar 47, 718 Ha. Dari kawasan kumuh tersebut Tahun 2021 telah dapat tertangani seluas 23, 288 Ha (48, 80%). Realisasi ini tercapai karena adanya upaya pengurangan dan penanganan kawasan kumuh melalui Program KOTAKU yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Program KOTAKU (Korkot 6 dan Fasilitator).

#### 2. Program Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Dengan indikator Persentase pengelolaan limbah B3 fasyankes dari 20-25% target yang ditetapkan telah terealisasi sebesar 27%. Tercapainya target ini dipengaruhi oleh terlaksananya pembinaan terhadap 20 fasyankes (Rumah sakit, puskesmas, klinik, praktek dokter dan bidan) pada Tahun 2021, lebih banyak dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 10 fasyankes. Hal ini menunjukkan bahwa cukup meningkatnya perhatian fasyankes terhadap pengelolaan limbah B3.

#### 3. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Dengan indikator tingkat ketaatan izin lingkungan dan/atau SPPL, dari target sebesar 50 terealisasi sebesar 52,4. Faktor yang mempengaruhi pencapaian target diantaranya karena adanya perbaikan yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban yang termuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sekalipun tingkat ketaatan ini telah melebihi target, namun tetap perlu dilakukan upaya pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang diawasi, karena tingkat ketaatan dihitung dengan cara penjumlahan bobot tingkat ketaatan seluruh usaha dan/atau kegiatan dibagi dengan jumlah usaha/kegiatan yang diawasi. Jika dilihat dari

masing-masing usaha/kegiatan yang diawasi, dari 30 usaha/kegiatan 25 berada pada kategori tidak taat (bobot dibawah 75).

Tidak optimalnya pencapaian target pada beberapa program diatas mempengaruhi capaian sasaran OPD, terutama Indeks Kualitas Air (IKA). Dimana dari target sebesar 55,79 baru tercapai sebesar 31,86. Hal ini menunjukkan masih tingginya tingkat pencemaran air permukaan di Kota Padang Panjang. Salah satunya dengan melihat penurunan kualitas air sungai di Kota Padang Panjang. Selain itu masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat baik rumah tangga, industri, pertanian/peternakan dan perdagangan dalam pengelolaan limbah juga mempengaruhi tingkat pencemaran air. Pengelolaan limbah yang tidak memenuhi baku mutu dari masing-masing sektor menjadi penyebab utama pencemaran. Parameter uji yang paling tinggi tingkat cemarannya adalah *E coli* dengan konsentrasi mencapai ratusan bahkan ribuan kali lipat melebihi baku mutu. Bakteri *E coli* biasanya bersumber dari tinja manusia maupun kotoran ternak.

Untuk indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) , dari target yang ditetapkan sebesar 70, 29 baru terealisasi sebesar 56, 18. Hal ini disebabkan karena perubahan penentuan Luas Tutupan Hutan dan Luas Tutupan Vegetasi Non Hutan. Luas Tutupan Hutan dan Vegetasi Non Hutan yang dihitung sebagai dasar penentuan IKTL adalah; Luas Hutan Kota, Luas Belukar di Kawasan Hutan, Luas Belukar di APL, Luas Ruang Terbuka Hijau dan Luas Areal Rehabilitasi Hutan. Sementara itu areal pertanian berupa sawah di Kota Padang Panjang yang sebelumnya digolongkan sebagai Ruang Terbuka Hijau tidak dapat lagi dihitung sebagai penyumbang luas RTH di Kota Padang Panjang. Untuk mencapai nilai indeks IKTL Nasional maka perlu didorong lebih giat penumbuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Padang Panjang berupa pembangunan Taman Kota maupun Hutan Kota.

. Selain itu dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, maka penetapan target untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang terdiri dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan mempedomani Surat Edaran tersebut. Daerah diminta melakukan penyesuaian dan upaya untuk pencapaian target yang telah di tetapkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut.

Gambaran lebih lengkap dari hasil pelaksanaan Renja dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2022 tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini.

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022  
Kota Padang Panjang

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun L:alu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	3	4	5	8	9	10	12	13=6+12		
1.01.04.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP									
1.01.04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100	90%		
1.01.04.01.01.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja, laporan keuangan perangkat daerah	60 laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	100	20 laporan		
1.01.04.01.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja, laporan keuangan perangkat daerah	60 laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	100	20 laporan		
1.01.04.01.01.03	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan ASN, Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun, Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran, Jumlah Laporan Prognosis	70 bulan, 45 laporan	14 bulan, 15 laporan	14 bulan, 15 laporan	14 bulan, 15 laporan	100	14 bulan, 15 laporan		
1.01.04.01.01.04	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	70 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100	14 bulan		
1.01.04.01.01.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan		
1.01.04.01.01.08	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	39 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	100	13 laporan		
1.01.04.01.01.09	Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan		

1	01	04	01	01	10					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik, air, dan komunikasi yang disediakan, jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan, Jumlah jenis barang cetakan dan jumlah pengadaan yang disediakan, Jumlah makan dan minum yang disediakan, Jumlah rapat-rapat koordinasi yang diikuti luar daerah	63 jenis, 174 jenis, 2 gedung kantor, 36 jenis dan 29928 lembar, 3099 ok, 414 ok	21 jenis 58 jenis 2 gedung kantor 12 jenis dan 6.331 lembar 1033 ok 150 ok	21 jenis 58 jenis 2 gedung kantor 12 jenis dan 6.331 lembar 1033 ok 150 ok	21 jenis 58 jenis 2 gedung kantor 12 jenis dan 6.331 lembar 1033 ok 150 ok	100	21 jenis 58 jenis 2 gedung kantor 12 jenis dan 6.331 lembar 1033 ok 150 ok		
1	01	04	01	01	11					Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik, air, dan komunikasi yang disediakan	63 jenis	21 jenis	21 jenis	21 jenis	100	21 jenis		
1	01	04	01	01						Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	174 jenis	58 jenis	58 jenis	58 jenis	100	58 jenis		
1	01	04	01	01	18						Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	2 gedung kantor	2 gedung kantor	2 gedung kantor	2 gedung kantor	100	2 gedung kantor		
1	01	04	01	01	19					Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah jenis barang cetakan dan jumlah pengadaan yang disediakan	36 jenis dan 29928 pgdaan	12 jenis 6.331 lembar	12 jenis 6.331 lembar	12 jenis 6.331 lembar	100	12 jenis 6.331 lembar		
1	01	04	01	02						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum yang disediakan	3099 ok	1033 ok	1033 ok	1033 ok	100	1033 ok		
1	01	04	01	02							Jumlah rapat-rapat koordinasi yang diikuti luar daerah	414 ok	150 ok	150 ok	150 ok	100	150 ok		
1	01	04	01	02	27					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan, Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	9 unit, 5 jenis, 3 sarana	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100	5 jenis		
1	01	04	01							Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yg diadakan	9 unit							
1	01	04	01							Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100	5 jenis		
1	01	04	01							Sub Kegiatan Pengadaan Pengadaan sarana dan perasarana pendukung gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	3 sarana							
1	01	04	01							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tagihan jasa air, listrik, telepon yang dibayarkan, Jumlah tenaga harian lepas yang tersedia	60 rekening, 16 orang	60 rekening, 16 orang	60 rekening, 16 orang	60 rekening, 16 orang	100	60 rekening, 16 orang		
1	01	04	01							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa air yang dibayarkan	60 rekening	24 rekening	24 rekening	24 rekening	100	24 rekening		

1	01	04	06							Jumlah tagihan jasa listrik yang dibayarkan	60 rekening	24 rekening	24 rekening	24 rekening	100	24 rekening		
1	01	04	06	01						Jumlah tagihan jasa telephone yang dibayarkan	60 rekening	12 rekening	12 rekening	12 rekening	100	12 rekening		
1	01	04	06	02					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas yang tersedia	16 orang	16 orang	16 orang	16 orang	100	16 orang		
									Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara, Jumlah jenis alat-alat kantor yang terpelihara, Jumlah gedung kantor yang terpelihara	34 unit, 6 jenis, 2 gedung kantor	31 unit	31 unit	31 unit	100	58 unit		
1	01	04	06	03					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	34 unit	31 unit	31 unit	31 unit	100	31 unit		
									Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis alat-alat kantor yang terpelihara	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100	6 jenis		
1	01	04	06	04					Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2 gedung kantor	2 gedung kantor	2 gedung kantor	2 gedung kantor	100	2 gedung kantor		
									<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard</b>	<b>85%</b>	<b>84,16%</b>	<b>86%</b>	<b>86%</b>	<b>100</b>	<b>88%</b>		
1	01	04	06	05					Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah jenis PSU yang tersedia	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis		
									Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman (jalan lingkungan, dam dan saluran)	2 kecamatan	2 kecamatan	2 kecamatan	2 kecamatan	100	2 kecamatan		
1	01	04	07	06					<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Rasio Rumah Layak Huni</b>	<b>95,56%</b>	<b>94,62%</b>	<b>94,96%</b>	<b>94,96%</b>	<b>100</b>	<b>95,24%</b>		
1	01	04	08						Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana atau relokasi yang direhab dan dibangun	12 unit	0 unit	0 unit	0 unit	100	0 unit		
1	01	04	08	01					Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban yang direhab dan dibangun	10 unit	0 unit	0 unit	0 unit	100	5 unit		
1	01	04	08	02					Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang di bangun bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	100	0 unit		

1	01	04	08	03				Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola	72 hunian	72 hunian	72 hunian	72 hunian	100	72 hunian		
1	01	04	08	04				Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola	72 hunian	72 hunian	72 hunian	72 hunian	100	72 hunian		
1	01	04	08	05					Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	100	6 orang		
1	01	04	08	06				<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase pengurangan kawasan kumuh</b>	<b>81,76%</b>	<b>100%</b>	<b>4,19</b>	<b>48,80%</b>	<b>1164</b>	<b>73,95%</b>		
1	01	04	09					Kegiatan Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	30 kali	10 kali	10 kali	10 kali	100	10 kali		
1	01	04	09	01				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi yang dilaksanakan	30 kali	10 kali	10 kali	10 kali	100	10 kali		
1	01	04	09						Jumlah kebijakan yang dibuat/diriview	1 dokumen	0	0	0	100	1 dokumen		
1	01	04	09	02				Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah kebijakan yang dibuat/diriview	1 dokumen	0	0	0	100	1 dokumen		
1	01	04	09					Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah yang direhab (APBD dan DAK)	177 unit		52 unit	52 unit	100	50 unit		
1	01	04	09	03				Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah yang direhab	177 unit		52 unit	52 unit	100	50 unit		
1	01	04	09					<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan lingkungan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>		
1	01	04	09					Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, Jumlah dokumen DDDT yang direvisi	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen		
1	01	04	10					Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	1.Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen		
1	01	04	10	01				Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS Revisi RTRW, Jumlah KLHS Perubahan RPJMD	4 dokumen	1 dokumen	2 dokumen					
1	01	04	10	02				Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Revisi RTRW	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100			
1	01	04	10	03				Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah KLHS Perubahan RPJMD	2 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100			

1	01	04	10	04					<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,57</b>		
1	01	04	10	05					Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jenis hasil uji, Jumlah Kampung Iklim yang dibina	3 jenis 9 kampung	2 jenis 5 kampung	2 jenis 7 kampung	2 jenis 7 kampung	100	2 jenis 8 kampung		
1	01	04	10	06					Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jenis hasil uji	3 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis		
1	01	04	11						Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Kampung Iklim yang dibina	9 kampung	5 kampung	7 kampung	7 kampung	100	8 kampung		
1	01	04	11						Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Data kualitas lingkungan, Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya	3 data 3 sungai	2 data	2 data	2 data	100	2 data		
1	01	04	11	01					Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Data kualitas lingkungan	3 data	2 data	2 data	2 data	100	2 data		
										Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya	3 sungai							
1	01	04	11	02					Kegiatan Pengelolaan Keaneka ragaman Hayatu Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Kehati, dan Jumlah Dokumen Kehatu yg seharusnya Tersedia	3 dokumen					1 dokumen		
									Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati		3 dokumen					1 dokumen		
									Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah taman yg dibangun dan jumlah taman yg terpelihara	8 lokasi 2 kecamatan					4 lokasi 2 kecamatan		
									<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Persentase pengelolaan limbah B3 fasyankes (jrh fasyankes yang mengelola limbah/penghasil limbah)</b>	<b>31-35%</b>		<b>20-25%</b>	<b>27%</b>	<b>108</b>	<b>26-30%</b>		
									Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) penghasil LB3 yang dibina	30 fasyankes	10 fasyankes	10 fasyankes	10 fasyankes	100	10 fasyankes		
									Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah usaha/kegiatan penghasil LB3 yang dibina	30 fasyankes	10 fasyankes	10 fasyankes	10 fasyankes	100	10 fasyankes		





## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Ditinjau dari jenis urusan yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, terdapat dua urusan wajib yaitu urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan lingkungan hidup. Urusan perumahan dan kawasan permukiman merupakan urusan wajib dengan kategori pelayanan dasar. Pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh suatu kabupaten/kota pada urusan ini terdiri dari dua bidang yaitu bidang perumahan rakyat dan bidang pekerjaan umum.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan minimal di Bidang Perumahan Rakyat adalah:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota, indikator Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Masing-masing pelayanan diatas harus dilaksanakan setiap tahunnya dengan target capaian 100% per tahun.

Pembiayaan untuk pelaksanaan SPM diatas telah diakomodir melalui Renstra Dinas PerkimLH Tahun 2018-2023 dan Rancangan Awal Renja setiap tahunnya. Namun dalam realisasinya, dengan beberapa pertimbangan tertentu diambil kebijakan untuk sementara waktu kebutuhan tempat tinggal bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi untuk sementara waktu ditampung lebih dahulu di Rusunawa, dan setelahnya akan dialokasikan anggaran untuk pembangunan rumah yang layak huni. Tahun 2022 telah dialokasikan anggaran untuk 2 unit rehab rumah bagi korban bencana. Sementara untuk tahun 2023 telah dialokasikan anggaran untuk 2 unit rehab rumah bagi korban bencana dan 2 unit rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

Sementara itu untuk kinerja pelayanan urusan lingkungan hidup, tidak ada ketentuan pelaksanaan SPM tertentu semenjak Tahun 2014. Namun layanan informasi kualitas lingkungan sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM sebelumnya tetap disediakan melalui berbagai kegiatan terkait.

Hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel 2.2

**Tabel 2.2.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**  
**Kota Padang Panjang**

No	INDIKATOR	SPM / standar nasional	IKK	TARGET RENSTRA OPD		REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				2020	2021	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100% (2024)		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100% (2024)		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70% (2025)		79,77%	82,29%	79,77%	82,29%	84,38%	86,80%
4	Pengurangan kawasan kumuh	10% (2019)		14,56	13,83	16,45	23,28	35,28	39
5	Persentase permukiman layak huni		90%	97%	94,12%	95,97%	94,12%	97,01%	97,90%

6	Indek Kualitas Lingkungan (IKLH)		69,78	65,79- 67,14	72,42	70,47	61,16	72,65	72,87
a.	Indeks Kualitas Air (IKA)		46	41,40- 42,30	55,79	47,89	31,86	55,89	55,99
b.	Indeks Kualitas Udara (IKU)			90 - 93,5	89	91,88	91,07	89,11	89,22
c.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			65,26	70,29	69,62	56,18	70,97	71,64
7	Berkurangnya Volume sampah yang masuk ke TPA		75%	75%	72%	85,93%	89,65%	73%	72%

## **2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### **2.3.1. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Beberapa isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas OPD pada urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

#### **1. Keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.**

Dengan luas wilayah secara administratif yang hanya 23 km<sup>2</sup>, diikuti dengan topografi yang didominasi kemiringan lebih dari 40%, menjadi batasan utama dalam pemanfaatan lahan di Kota Padang Panjang, khususnya untuk kegiatan budidaya. Sementara kebutuhan lahan untuk perumahan dan permukiman cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

#### **2. Potensi berkembangnya kawasan kumuh perkotaan akibat ketidakteraturan bangunan perumahan.**

Berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 189 Tahun 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Padang Panjang, ditetapkan kawasan kumuh baru di Kota Padang Panjang seluas 47,718 Ha. Sebelumnya dalam Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 050/357/WAKO-PP/2014 Tahun 2014 dimana luas kawasan kumuh adalah sebesar 53,06 Ha, dan telah berhasil dituntaskan sampai Tahun 2020. Dengan munculnya kawasan kumuh baru ini, maka upaya-upaya penataan kawasan permukiman perlu terus dilaksanakan, sekaligus mengantisipasi timbulnya kawasan kumuh baru akibat perkembangan kebutuhan masyarakat akan hunian dan permukiman itu sendiri.

#### **3. Belum Optimalnya Penanganan rumah tidak layak huni.**

Berdasarkan perhitungan Tahun 2021, ratio rumah layak huni di Kota Padang Panjang mencapai 94,96%. Hal ini berarti masih ada potensi Rumah Tidak Layak Huni sebesar 5,04%. Sampai Tahun 2021 terdapat 356 unit rumah tidak layak huni. Apabila tidak ada penanganan lebih lanjut, keberadaan Rumah Tidak Layak Huni berpotensi memunculkan Kawasan Kumuh baru yang dapat berakibat pada penurunan kualitas hidup dan kualitas lingkungan perkotaan. Selain itu jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berpotensi meningkat seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan hunian dan permukiman itu sendiri.

#### **4. Belum optimalnya penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di lingkungan permukiman**

Dengan adanya pertumbuhan penduduk, kebutuhan terhadap perumahan terus meningkat. Penambahan perumahan dan permukiman ini, harus diiringi dengan

penyediaan sarana prasarana umum (PSU) yang memadai. Salah satu sarana prasarana umum yang perlu mendapat perhatian yaitu saluran drainase. Curah hujan yang relatif tinggi di Kota Padang Panjang, kecenderungan pola pembangunan yang semakin mengurangi areal resapan air, berpotensi meningkatkan volume air yang harus ditampung oleh badan air terutama saluran drainase. Maka diperlukan upaya pemeliharaan saluran drainase terutama di kawasan permukiman.

### **2.3.2. Urusan Lingkungan Hidup**

Sementara itu untuk urusan lingkungan hidup, beberapa isu strategis yang menyangkut dengan penyelenggaraan tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

#### **1. Belum optimalnya penanganan pencemaran air permukaan.**

Pada Tahun 2021, Indeks Kualitas Air di Kota Padang Panjang berada pada angka 31, 86. Hal ini mengindikasikan tingkat pencemaran air yang masih buruk. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 kualitas air kota padang panjang mengalami penurunan. Tahun 2020 7 sungai yang ada di padang panjang telah berada di status cemar ringan, Namun Tahun 2021 berdasarkan hasil pengujian, ke 7 sungai tersebut menurun statusnya kembali menjadi cemar sedang. Hal ini tentunya menuntut perhatian yang lebih besar dari Pemerintah Daerah. Langkah-langkah komprehensif yang terpadu perlu dilakukan dengan seluruh sektor terkait, termasuk mengembangkan kerjasama pengelolaan sungai dengan kabupaten tetangga. Tingkat pencemaran air akan sangat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup daerah secara keseluruhan. Dari data indeks kualitas air juga dapat terlihat tingkat ketaatan pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Data hasil pengawasan Tahun 2021 menunjukkan tingkat ketaatan yang masih rendah di Kota Padang Panjang yaitu sebesar 52,4%.

#### **2. Belum Optimalnya penanganan sampah perkotaan**

Sesuai dengan arahan Jakstrada Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, penanganan sampah di Kota Padang Panjang ditargetkan menurun dari tahun ke tahun. Penurunan penanganan ini berkorelasi dengan target pengurangan timbulan sampah dari sumber yang meningkat dari waktu ke waktu. Namun realisasi pada tahun 2021 menunjukkan justru terjadi peningkatan penanganan sampah mencapai 89,65% dari target seharusnya sebesar 74%. Realisasi

ini menunjukkan bahwa volume sampah yang masuk ke TPA relatif masih tinggi dan pengurangan timbulan dari sumber belum terlaksana secara optimal.

Dengan hampir berakhirnya umur pakai TPA Sungai Andok akan berpengaruh terhadap kinerja penanganan sampah Kota Padang Panjang. Apabila tidak didapatkan lokasi baru untuk dijadikan TPA di Kota Padang Panjang, maka pembuangan sampah kota bisa dilakukan ke TPA Regional yang berada di daerah lain. Tentunya untuk dapat melaksanakan opsi tersebut, diperlukan sumber daya yang cukup besar baik dalam hal personil, ketersediaan armada pengumpulan dan pengangkutan serta kemampuan pembiayaan.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2023**

Mengacu pada Renstra 2019-2023, dilakukan analisis lebih lanjut terhadap kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan rencana kegiatan dan analisis kebutuhan kemudian dimunculkan sejumlah program dan kegiatan beserta penganggarannya. Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 terdapat 12 Program, 18 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan Pagu Indikatif Rp. 17.191.892.384,-. Sementara Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2023 terdiri dari 11 Program, 17 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan Pagu Indikatif Rp. 21.131.908.844.

Perbedaan Rancangan awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan ini disebabkan karena adanya penggabungan beberapa Sub Kegiatan menjadi satu Sub Kegiatan. Selain itu terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan yang terletak pada 1(satu) Kegiatan dan 1(satu) Program yang dihilangkan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah pada saat ini, sehingga perlu dilakukan efisiensi anggaran. Untuk Pagu Indikatif, penambahan terjadi karena adanya usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik yang diperoleh dari hasil musrenbang maupun pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Untuk lebih jelasnya perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.3  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023  
Kota Padang Panjang

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	KebutuhanDana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				17,191,892,384	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				21,131,908,844	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,411,863,264	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,354,927,264	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,096,841,064	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,095,191,064	
1	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	37 orang	4,095,191,064	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	37 orang	4,095,191,064	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Padang Panjang	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun		850,000						
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Padang Panjang	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun		500,000						
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Padang Panjang	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun		300,000						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				393,588,200	Administrasi Umum Perangkat Daerah				395,050,200	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	21 Paket	8,320,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	21 Paket	7,770,000	

6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	58 Paket 2 Unit	66,689,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	58 Paket 2 Unit	68,489,450
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang Panjang	Jumlah jenis barang cetakan Jumlah Penggandaan yang disediakan	13 Jenis 9976 Lembar	15,919,200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang Panjang	Jumlah jenis barang cetakan Jumlah Penggandaan yang disediakan	13 Jenis 9976 Lembar	16,130,750
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan Jumlah rapat-rapat koordinasi yang diikuti luar daerah	1033 Ok 138 kali	302,660,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan Jumlah rapat-rapat koordinasi yang diikuti luar daerah	1033 Ok 138 kali	302,660,000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>633,644,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>633,244,000</b>
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Panjang	Jumlah jenis tagihan rekening yang dibayarkan	60 tagihan	51,932,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Panjang	Jumlah jenis tagihan rekening yang dibayarkan	60 tagihan	51,532,000
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang Panjang	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	16 Orang	581,712,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang Panjang	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	16 Orang	581,712,000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>287,790,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>231,442,000</b>
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	4 Unit	32,724,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	4 Unit	32,724,000
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang Panjang	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	28 Unit	121,726,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang Panjang	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	28 Unit	122,848,000
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6 jenis	36,720,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6 jenis	25,870,000
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	96,620,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	50,000,000



	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>				<b>379,362,980</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>				<b>359,904,780</b>	
	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>				<b>110,120,000</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>				<b>104,000,000</b>	
15	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Padang Panjang	Jumlah rumah korban bencana yang direhab dan di bangun	5 Unit Rumah	55,060,000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Padang Panjang	Jumlah rumah korban bencana yang direhab dan di bangun	5 Unit Rumah	52,000,000	
16	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah rumah korban bencana atau relokasi yang terehabilitasi	5 Unit Rumah	55,060,000	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah rumah korban bencana atau relokasi yang terehabilitasi	5 Unit Rumah	52,000,000	
	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>				<b>269,242,980</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>				<b>255,904,780</b>	
17	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Padang Panjang	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola	72 hunian	269,242,980	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Padang Panjang	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola	72 hunian	255,904,780	
	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>				<b>87,663,300</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>				<b>1,125,118,166</b>	
	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>				<b>87,663,300</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>				<b>1,125,118,166</b>	
18	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Padang Panjang	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	118 Unit Rumah 25 Unit	37,060,000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Padang Panjang	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	118 Unit Rumah 25 Unit	1,096,000,066	
19	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Padang Panjang	Jumlah laporan hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	50,603,300	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Padang Panjang	Jumlah laporan hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	29,118,100	

	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>				<b>356,839,000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>				<b>3,146,907,043</b>	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				<b>356,839,000</b>	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				<b>3,146,907,043</b>	
20	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Padang Panjang	Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman Jumlah lokasi permukiman yang dilengkapi dengan bangunan pengamanan Jumlah ruas jalan lingkungan yang sesuai standar (dengan perkerasan) Jumlah saluran drainase teknis (konstruksi beton)	2 Kecamatan 10 Lokasi 73 Lokasi 16 Lokasi 12 Lokasi	356,839,000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Padang Panjang	Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman Jumlah lokasi permukiman yang dilengkapi dengan bangunan pengamanan Jumlah ruas jalan lingkungan yang sesuai standar (dengan perkerasan) Jumlah saluran drainase teknis (konstruksi beton)	2 Kecamatan 10 Lokasi 73 Lokasi 16 Lokasi 12 Lokasi	3,146,907,043	
	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>208,953,900</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>304,950,350</b>	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				<b>30,000,000</b>	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				<b>26,923,450</b>	
21	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, Jumlah dokumen DDDT yang direvisi	2 Dokumen 0 Dokumen	30,000,000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, Jumlah dokumen DDDT yang direvisi	2 Dokumen 0 Dokumen	26,923,450	
	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>				<b>178,953,900</b>	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>				<b>278,026,900</b>	
22	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		Jumlah dokumen KLHS Rencana tata Ruang Kabupaten/Kota yang dibangun	1 Dokumen	178,953,900			Jumlah dokumen KLHS Rencana tata Ruang Kabupaten/Kota yang dibangun	1 Dokumen	178,026,900	
23	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Padang Panjang	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang dibangun	1 Dokumen		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Padang Panjang	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang dibangun	1 Dokumen	100,000,000	

	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>362,498,890</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>354,620,390</b>	
	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>				<b>332,511,340</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>				<b>325,958,840</b>	
24	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Padang Panjang	Jumlah Kampung Iklim yang dibina	9 kampung	25,830,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Padang Panjang	Jumlah Kampung Iklim yang dibina	9 kampung	25,830,000	
25	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jenis Hasil Uji	2 Jenis	306,681,340	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jenis Hasil Uji	2 Jenis	300,128,840	
	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>				<b>29,987,550</b>	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>				<b>28,661,550</b>	
26	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Padang Panjang	Data kualitas lingkungan Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya	2 Data 1 Sungai	29,987,550	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Padang Panjang	Data kualitas lingkungan Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya	2 Data 1 Sungai	28,661,550	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>				<b>1,957,961,850</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>				<b>2,141,344,851</b>	
	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>				<b>1,957,961,850</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>				<b>2,141,344,851</b>	
27	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang disusun	1 Dokumen	29,777,000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang disusun	1 Dokumen	28,060,000	

28	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Padang Panjang	Jumlah lokasi pembuatan taman Jumlah lokasi pemeliharaan taman	2 lokasi 4 Lokasi	1,928,184,850	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Padang Panjang	Jumlah lokasi pembuatan taman Jumlah lokasi pemeliharaan taman	2 lokasi 4 Lokasi	2,113,284,851	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>				<b>12,061,000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>				<b>9,095,000</b>	
	<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>12,061,000</b>	<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>9,095,000</b>	
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Padang Panjang	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) penghasil LB3 yang dibina	10 lokasi	12,061,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Padang Panjang	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) penghasil LB3 yang dibina	10 lokasi	9,095,000	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>				<b>23,052,500</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>				<b>18,822,000</b>	
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>23,052,500</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>18,822,000</b>	
30	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, Surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	25 Laporan	23,052,500	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, Surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	25 Laporan	18,822,000	

	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>				114,399,950					-	
	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				114,399,950					-	
31	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Padang Panjang			114,399,950						
	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>				81,380,000	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>				76,350,000	
	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				81,380,000	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				76,350,000	
32	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Padang Panjang	Jumlah koordinasi adipura yang dilaksanakan Jumlah sekolah adiwiyata yang dibina	3 Kali 45 Sekolah	81,380,000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Padang Panjang	Jumlah koordinasi adipura yang dilaksanakan Jumlah sekolah adiwiyata yang dibina	3 Kali 45 Sekolah	76,350,000	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>				8,195,855,750	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>				8,239,869,000	
	<b>Pengelolaan Sampah</b>				8,195,855,750	<b>Pengelolaan Sampah</b>				8,239,869,000	
33	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan	183 Orang	5,832,245,250	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan	183 Orang	5,903,795,750	

34	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Padang Panjang	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat	4 kali	20,000,000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Padang Panjang	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat	4 kali	19,640,000	
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Padang Panjang	Jumlah jenis prasarana persampahan yang tersedia dan dipelihara	4 Jenis	696,292,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Padang Panjang	Jumlah jenis prasarana persampahan yang tersedia dan dipelihara	4 Jenis	1,562,383,250	
36	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan diTPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah TPA yang dipelihara	1 TPA	1,647,318,500	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan diTPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah TPA yang dipelihara	1 TPA	754,050,000	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi, perguruan tinggi melalui pelaksanaan musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, Forum SKPD dan musrenbang RKPD Kota. Usulan Musrenbang yang diakomodir dalam rancangan Renja Akhir Tahun 2023 adalah usulan yang telah melalui proses investigasi (penelitian lapangan) dan verifikasi di tingkat kecamatan, Bappeda dan OPD tujuan.

Selain usulan Musrenbang, Rancangan Akhir Renja Tahun 2023 juga mengakomodir hasil reses DPRD berupa pokok-pokok pikiran Anggota DPRD tersebut sesuai dengan tupoksi yang ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

Terdapat beberapa Sub Kegiatan yang mengakomodir usulan Musrenbang dan Pokir DPRD, diantaranya :

1. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak layak Huni. Terdapat 119 usulan Pokok Pikiran pada Sub Kegiatan ini, berupa bantuan rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian. Terdapat 14 usulan musrenbang dan 58 Pokok Pikiran terkait penyediaan PSU di kawasan permukiman berupa perbaikan dan pembangunan bangunan pengaman, perbaikan jalan lingkungan serta pembangunan dan perbaikan saluran drainase di kawasan permukiman.
3. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Terdapat 2 usulan Pokok Pikiran pada Sub Kegiatan ini, berupa pemeliharaan Taman Kota.

Usulan hasil Musrenbang dan pokok pikiran yang terakomodir pada rancangan akhir Renja 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023  
PROVINSI /KABUPATEN/KOTA PADANG PANJANG**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
	<b>Program Kawasan Permukiman</b>				
	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ( sepuluh) Ha</b>				
	<b>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</b>				
1	<b>Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga</b>				
	Bantuan bedah rumah atas nama Syamsuar		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Warnely		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Gusniar		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Guswendri		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Syafril		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Mino Chandra		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Sudibyo		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Marni		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Latifah		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Mira		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Yarnis		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Yulsi Herman		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Risya Pratama		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Prima Saputra		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Suharnizal		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Ermita		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Asniamiarta Roza		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Srika susanti		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Mariatun		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Siska Zullia Fitri		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Rosmala Dewi		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Anwar Kamil		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Nova Ramadhani		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Sulastrri		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Isfa Yentis		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Darias		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Nurhayati		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Yusi Anggraini		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Willy Rosman		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Ismel Joni		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Amrita Idrus		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Nedy Syofyant		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Syafroni		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Rini Febrianti		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama David Saputra		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Ratnawati		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Syafrizal		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Bujang Mon		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Intan Puspita		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR



	Bantuan bedah rumah atas nama Muslim		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Azwir		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Masdiani		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Zurweryetti		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Bobby		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Ari Sofyanto		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Jusmaini		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Yarni Emi		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Desmawati		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Zairil		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Rahmat		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Yusni		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Asril		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Nelson		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Kuang Yuang		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Ernita		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Rismawati		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Saiful		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Syafri Yanto		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Martini		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Syafrizul		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Syamsuar		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Almaida		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama asniar		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Riko Fernandes		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Novid Firdaus		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Dodi Prayoga		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Monalisa		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Yosi Andria		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Dona Karmila		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Zulkarnaen		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Sugino		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Syahrial		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Syamsir Jamal		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Nazar		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Lisa Ramadani		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Doni Andri		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Desri Jhoni		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Yesi Yuliani		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Rudi Syahmi		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Gusemila		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Surnilawati		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Yulhendri		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Armain		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR

	Bantuan bedah rumah atas nama Syaiful Nadri		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Nelmizon		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Emi S		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Anita/Fris Herman		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Herman		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Maizul Donis		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Murniati		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Mardiaty		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Reski Zurnita		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Deby Syaputra		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Gusnidar		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Bismi esi		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Jamiran		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Gandhi		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Dodi Patriya		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Sabar Saputra		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Naslimur		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Zuarman		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Amrizal		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Asiah		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Akhirman		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Zainal Abidin		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Hendrik		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Maswarizal		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Irwan		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Burhanis		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Dozi Noveri		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Sabaruddin		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Martini		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Refdinal		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Syaiful Efendi		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Erni Yusnifa		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Rosita		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Rosmiati		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	Bantuan bedah rumah atas nama Afrizal		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 UNIT	POKIR
	<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum</b>				
	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>				
	<b>Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</b>				
<b>2</b>	<b>Belanja Modal Jalan Kota</b>		Jumlah jenis PSU yang tersedia		
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Rehab Jalan Setapak dari depan ruma Buk Mar (RT 21) sampai ke rumah pak Wirmanto (RT 19) Kel. Balai Balai	Kel. Balai- Balai	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Pengecoran Jalan samping rumah Bapak Ikhsan sampai rumahn Bapak Ulil RT.08 Kel Silaing Bawah	Kel. Silaing Bawah	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Peningkatan Jalan Setapak dari rumah Dahlibar sampai rumah Nurlinda Padang Data RT. 8 Kel Ekor Lubuk	Kel. Ekor Lubuk	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	

	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Peningkatan Jalan Setapak RT 11 Kel. Ganting	Kel. Ganting	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Perbaikan Jalan ke Mushalla Nurul Falah Bukit kandung RT. 9 Kel Ganting	Kel. Ganting	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Pembuatan Jalan Setapak di atas saluran drainase (plat beton bertulang) Depan rumah Deni Susanti RT. 22 Kel. Guguk Malintang	Kel. Guguk Malintang	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan pelebaran dan pendaman jalan RT.14 Guguk Malintang	Kel. Guguk Malintang	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan peningkatan jalan setapak menuju mushala al baraqah menjadi paving slab dan plasteran tebing belakang kantor lurah sampai mushola al baraqah rt15		Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan plesteran dinding, penutup riol dan pembuatan jalan setapak rt 15 balai-balai	Kel. Balai- Balai	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan rt 17 balai-balai	Kel. Balai- Balai	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan pengecoran jalan dan pembuatan saluran rt 8 depan terminal busur	Kel. Busur	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan pengecoran beton badan jalan gang akasia rt 8 dgn puskesmas		Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Pemasangan paving blok (panjang jalan 15 x 1 meter, daman 3 x 15 meter) Jl. Rasuna Said, RT 8 belakang Kantor Camat Pd. Panjang Barat	Kel. Kampung Manggis	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Perbaikan Jalan Setapak dan Realing Di Pandam Pakuburan Kebun Sikolos	Kebun Sikolos	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Fasilitas Umum Lingkungan rehab tangga rt 4 sumur lurah japing rt 4 pasar usang	Pasar Usang	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Fasilitas Umum Lingkungan rehab sumur lurah japing rt 4 sumur lurah japing rt 4	Pasar Usang	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Pendaman dan perbaikan jalan setapak (panjang jalan 20 x 2 meter, daman bawah 8 x 3 meter, daman atas 8 x 20 meter) Jl. ST. Syahrir RT 16, belakang mesjid Nurul Hidayah		Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pendaman dan pengerasan jalan (Panjang jalan 45 x 3 meter, Daman 50 x 8 meter) Jl. Sutan Syahrir No. 24 RT 18		Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Pemasangan batu air di tepi jalan setapak dan pemasangan paving blok RT 9 Tanah Hitam	Tanah Hitam	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan pembuatan jalan setapak RT. 1 dan RT 8		Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Pelebaran Jalan Dari Posronda Sampai Depan SDN 06 Kelurahan Ekor Lubuk RT.7	Kel. Ekor Lubuk	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Peningkatan dan Pelebaran Jalan Setapak Di Bungo RT.4		Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	pembuatan jalan setapak (pemasangan paving slip ) RT 5 dan RT. 7 Kelurahan Gantiang	Kel. Ganting	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan pembuatan jalan setapak RT. 6 dan RT 11 Kelurahan ganting	Kel. Ganting	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	cor jalan setapak lebar 3 meter panjang 500 meter RT 12 kelurahan ganting	Kel. Ganting	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Pembuatan jalan lingkaran di RT.22 Jl. MR.M.Roem RT.22		Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Pembuatan jalan setapak RT. 4 Kelurahan koto panjang	Kel. Koto Panjang	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Pembuatan jalan setapak RT. 20 sepanjang 100 meter lebar 3 meter Kelurahan Koto Panjang	Kel. Koto Panjang	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Lingkungan Pengecoran Jalan Setapak RT 10 Kacang Kayu	Kacang Kayu	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pemasangan Pavin Blok Jalan Lingkaran Kelompok Rumah Masyarakat RT.6 Ikua Tanjung dari depan kantor lurah sigando ke ikua tanjung - Kelok Sigando- ke depan jalan kandang jawi	Sigando	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	<b>Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya</b>				
	Pembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing Lingkungan Pembangunan dan Peningkatan DAM tanah kuburan dekat Mushalla Al-Birr Kel. Bukit Surungan	Kel. Bukit Surungan	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing Lingkungan Pemasangan Paving Slab dan DAM di belakang rumah Mas Ateng (Miso) Kel. Balai Balai	Kel. Balai- Balai	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pemasangan Pagar Pengaman RT 22 samping rumah Pak Erdiman Kel. Silaing Bawah	Kel. Silaing Bawah	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pemasangan pagar pengaman dari besi RT 11 menuju RT 13 Kel Silaing Bawah	Kel. Silaing Bawah	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing Lingkungan Plesteran tebing depan Mushala albaqarah RT 15		Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing Pendaman RT 02 Kampung Manggis	Kel. Kampung Manggis	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing Lingkungan Pendaman dekat rumah NEDYSOPYAN dan WILLY ROSMAN RT. 002 Kampung Manggis	Kel. Kampung Manggis	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	

	Pembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing Pendaman sumur umum lokasi belakang dapur singgalang belakang dapur singgalang RT. 2 Kampung Manggis	Kel.Kampung Manggis	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing Lingkungan Pendaman RT 13 kelurahan Kampung Manggis dibelakang rumah PIR	Kel.Kampung Manggis	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Lanjutan Pengedaman Dekat Kantor Kecamatan Padang Panjang Barat RT. VIII Kelurahan Kampung Manggis	Kel. Kampung Manggis	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pengedaman tanah sepanjang jalan lebih kurang tinggi 6 meter panjang 23 meter RT. 13 Kampung Teleng	Kampung Teleng	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Fasilitas Umum Lingkungan pembuatan pagar penganman sepanjang kolam rt 4 pasar usang	Pasar Usang	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing Lingkungan Pendaman panjang 120 tinggi 2 meter RT. 7 kelurahan kampung jawo	Kel.Kampung Jawo	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing Lingkungan pendaman tebing jembatan di Rt.2 Kel. Silaing Bawah..perbatasan silaing bawah dan silaing atas	Kel.Silaing Bawah	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Lanjutan pendaman RT. 13 kelurahan Silaing Bawah	Kel.Silaing Bawah	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pemasangan Pagar Pengaman dari Besi RT 11 Penghubung antara RT 11 dan RT.13		Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing Lingkungan Lanjutan Pendaman Dibelakang rumah ibu rodiyah RT.17		Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pendaman lebar 1 meter kiri kanan ke dalam 40 meter ke bawah Komplek silaiaing glas RT. 6 kelurahan silaing bawah	Kel.silaing Bawah	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing pendaman rt 7 ekor lubuk	Kel.Ekor Lubuk	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	lanjutan pendaman tebing di Taratak ekor Lubuk Taratak RT.6 Ekor lubuk	Kel.Ekor Lubuk	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing Lingkungan Pendaman RT. 4 Kelurahan Ganting	Kel.Ganting	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	pendaman tebing dekat rumah warga yang lokasinya dekat SD 8 ganting	Kel.Ganting	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pendaman Tebing Disamping Puskesmas Tanjung RT.10 Kelurahan Ganting	Kel.Ganting	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing pendaman pincuran laku kelurahan guguk malintang	Kel.Guguk Malintang	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing Lingkungan Pendaman di lokasi pemukiman RT 6, samping kantor BKSDM (Bapak Hendrico/ketua RT)	Kel.Guguk Malintang	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing Lingkungan Pendaman RT 15, dekat masjid Nurul Hidayah (Bapak Hendrico/ketua RT)		Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing Lingkungan Lanjutan Pendaman Kuro-Kuro RT.11 Kelurahan Ngalau	Kel.Ngalau	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing Lingkungan Pengedaman RT. 2 kelurahan tanah pak lambik	Kel.Tanah Pak Lambik	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
<b>3</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya</b>				
	Pembangunan/ Perbaikan Drainase (Trotoar) Lingkungan penutupan riol dibelakang rumah pak nasrul efendi sampai rumah risya pratama rt 15		Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembuatan Riol di RT. 17 dan RT. 21 Kel. Silaing Bawah Gang samping rumah ibu Elia Merida sampai dengan samping rumah ibu Yusi Nora di RT. 17, Gang sebelah bengkel Anto sampai samping rumah Bapak Hanif RT. 21 Kel. Silaing Bawah	Kel.silaing Bawah	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Drainase (Trotoar) Lingkungan pembuatan riol RT 11 kelurahan Silaing Bawah	Kel.silaing Bawah	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Drainase (Trotoar) Lingkungan Pembuatan Saluran Tertutup RT 12 & RT 16		Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Drainase (Trotoar) Lingkungan Pembuatan saluran riol/drainase RT 5, dekat rumah ketua RT (Bapak Fiko Alyando)		Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Drainase (Trotoar) Drainase Atau Banda Dari Simpang Bukik Kandung Ke Tanjung (Sampai Kandang Jawi)	Tanjung	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Drainase (Trotoar) Lingkungan perbaikan gorong-gorong Jl. MR.M.Roem RT.22		Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Drainase (Trotoar) Lingkungan Penutupan riol RT. 4 Kelurahan koto panjang	Kel.Koto Panjang	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembuatan Riol 75 meter RT 18 Kelurahan Koto Panjang	Kel.Koto Panjang	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Perbaikan Drainase RT.7 Sigando	Kel.Sigando	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Drainase (Trotoar) Pembuatan riol RT.2 dan 3. Pembuatan Plat dueker di simpang mesjid Asasi RT 05 RT 02 - 03 (dari depan rumah buk fahmi sampai ke Thawalib gunung) RT 05	Kel.Sigando	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Drainase (Trotoar) Lingkungan Penutupan riol sepanjang 100 meter RT. 2 kelurahan tanah pak lambik	Kel.Tanah Pak Lambik	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Sarana dan Prasarana Sanitasi Perbaikan Banda Kelurahan Tanah Hitam RT. 15 No.43	Kel.Tanah Hitam	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Drainase (Trotoar) Lingkungan di Lambah RT.1, Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ganting	Kel.Ganting	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan Drainase (Trotoar) Lingkungan Pengecoran dan pemasangan paving slip RT. 2 kelurahan tanah pak lambik	Kel.Tanah Pak Lambik	Jumlah jenis PSU yang tersedia	1 Paket	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>				
	<b>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</b>				
	<b>Belanja Modal taman</b>				
	Pembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing rt.9 kelok kabuik ganting, Kota Padang Panjang, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Kel.Ganting	Tersedianya dokumen kehati, terpelihara dan terbangunnya RTH	1 Paket	
	Pembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing Di Kelok Kabuik, Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ganting	Kel.Ganting	Tersedianya dokumen kehati, terpelihara dan terbangunnya RTH	1 Paket	

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan Renja Tahun 2023 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Arah kebijakan untuk urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Beberapa indikator pada prioritas dan sasaran pembangunan tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi indikator Standar Pelayanan Minimal di Daerah yaitu (1) Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni; dan (2) Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. Target capaian dari masing-masing indikator tersebut pada Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Untuk dapat mewujudkan target tersebut Pemerintah Daerah perlu menyiapkan beberapa alternatif kebijakan diantaranya penyediaan hunian baru pelaksanaan rehabilitasi hunian atau penyediaan penampungan sementara yang layak huni.

Dalam hal penanganan kawasan kumuh, di Kota Padang Panjang telah ditetapkan kawasan kumuh seluas 47,718 Ha melalui Keputusan Walikota Nomor 189 Tahun 2020. Oleh karena itu kebijakan penanganan kawasan ini secara terpadu dan berkesinambungan perlu dilakukan untuk dapat dituntaskan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama.

Dalam hal memenuhi ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat, Pemerintah Kota Padang Panjang juga perlu menerapkan kebijakan yang sejalan dengan kebijakan Nasional yakni meningkatkan jumlah rumah layak huni. Jika secara nasional ditargetkan pengurangan rumah tidak layak huni mencapai 177.925 unit pada Tahun 2023, maka Kota Padang Panjang juga perlu menerapkan kebijakan serupa di level daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Kondisi sampai dengan akhir Tahun 2021 menunjukkan data jumlah rumah tidak layak huni di Kota Padang Panjang sebanyak 356 unit.

Sementara itu dengan ditetapkannya target nasional berupa peningkatan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman sebesar 100% pada Tahun 2023, maka daerah perlu mendukungnya dengan menyiapkan kebijakan berupa pembangunan PSU baru maupun peningkatan kualitas PSU yang telah tersedia.

Tabel 3.1 Arah Kebijakan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 dan Kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	
2	Menurunnya kawasan kumuh	Persentase penurunan kawasan kumuh	Persentase pengurangan kawasan kumuh	83%	
3	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Rasio Rumah layak huni	56, 93%	
4	Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100%	

Tabel 3.2 Arah Kebijakan Nasional Urusan Lingkungan Hidup

No.	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69, 48 poin	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 dan Kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Meningkatnya penanggungjawab usaha yang taat terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan	68%	
3	Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	Terlaksananya pengelolaan sampah, meliputi :  a. Persentase pengurangan timbulan sampah  c. Persentase penanganan timbulan sampah	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota, meliputi:  b. Persentase pengurangan timbulan sampah  d. Persentase penanganan timbulan sampah	11,18  31,41	



Untuk urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat dari sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020. Terdapat prioritas nasional yang terkait dengan KLHK, arah kebijakan dan strategi dalam prioritas tersebut terdiri dari 1) peningkatan kualitas lingkungan hidup, 2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan 3) pembangunan rendah karbon.

Sementara untuk Tahun 2022, prioritas pembangunan nasional pada urusan lingkungan hidup mengarah pada 3 kinerja utama sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih menjadi prioritas yang muncul setiap tahunnya. Kebijakan ini diperlukan sebagai fungsi kontrol terhadap munculnya dampak akibat pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. Target IKLH nasional yang ditetapkan sebesar 69,22 poin, harus dicapai dengan memastikan perbaikan terhadap kualitas air, udara dan lahan. Untuk Kota Padang Panjang, berdasarkan hasil pemantauan yang dilaksanakan, maka prioritas utama perlu diarahkan pada perbaikan kualitas air.

Peningkatan kualitas lingkungan tidak bisa terlepas dari peran berbagai *stakeholder*. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap kondisi kualitas lingkungan. Ada sejumlah indikator yang perlu dipantau melalui instrumen izin lingkungan, izin PPLH ataupun izin lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu disiapkan berbagai upaya yang dapat meningkatkan jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap ketentuan perizinan lingkungan.

Kinerja berikutnya yang menjadi prioritas pada pembangunan nasional adalah pengelolaan persampahan. Sejalan dengan telah ditetapkannya kebijakan dan strategi nasional (Jakstranas) dibidang persampahan, maka fokus pengelolaan sampah diarahkan pada penurunan timbulan dan penanganan sampah. Kota Padang Panjang pada Tahun 2018 telah menyikapi kebijakan tersebut melalui penetapan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Untuk Tahun 2023 ditargetkan pengurangan timbulan sampah sebesar 27% dan penanganan sampah sebesar 72%.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Mengacu pada Renstra Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 dirumuskan sebagai berikut :

#### 1) Tujuan

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan
2. Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan
3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Tujuan diatas sejalan dengan sasaran pada RPJMD 2018-2023 yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian Misi Pertama **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan** dan Misi Kedua **Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya.**

#### 2) Sasaran

Tujuan pertama dijabarkan menjadi dua sasaran yaitu :

- (1) Meningkatnya Kualitas lingkungan permukiman; dan
- (2) Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan.

Tujuan kedua terdiri dari satu sasaran yaitu:

- (1) (3) Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin

Sementara Tujuan ketiga terdiri dari satu sasaran yaitu :

- (2) Meningkatnya cakupan layanan pencegahan stunting dari Urusan Lingkungan Hidup

#### 3) Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target Indikator Kinerja Kunci penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Lingkungan Hidup untuk Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.3

## INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Target 2023	Sumber Data	OPD
1	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
a.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun ----- x 100% jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	100%	Laporan Kegiatan	
b.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan dan/atau + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni -----x 100% jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan.	100%	Laporan Kegiatan	
c.	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ----- x 100% Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	39.0179 ha -----x 100% 47,718 Ha =81,76%	KOTAKU	
d.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni ----- x 100% jumlah total unit rumah di kabupaten /kota	688 unit ----- x 100% 15.499 = 4,43%	Hasil Survey	
e.	Jumlah perumahan yang dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun yang terfasilitasi PSU -----x 100% Jumlah unit rumah kabupaten/kota	data tidak tersedia	Hasil Survey	
	Urusan Lingkungan Hidup				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
a.	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)		72,65	Hasil pemantauan	
b.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten / kota	Total vol sampah yang dapat ditangani -----x 100% Total vol timbunan sampah kabupaten/kota	12498,19 ton/tahun ----- x 100% 17358, 59 ton/tahun =72%	Jakstrada Kota Padang Panjang	
c.	Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota -----x100% usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	65%	Laporan Hasil Pengawasan	

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang muncul pada Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada dasarnya adalah program kegiatan yang telah tercakup pada Renstra Dinas dan RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023. Perumusan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan visi dan misi Walikota, kebijakan nasional dan daerah dalam bidang Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup, kecenderungan kualitas lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka telah dilakukan Perubahan Renstra OPD dan Perubahan RPJMD, yang menjadi pedoman penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyusunan Renja Tahun 2023.

Terkait visi dan misi Walikota, salah satu sasaran pembangunan ekonomi Kota Padang Panjang yang telah ditetapkan adalah meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dengan indikator persentase kenaikan indeks kualitas layanan infrastruktur (IKLI) dan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Menyikapi kebijakan tersebut maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menyusun Program Kawasan Permukiman dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) untuk mendukung pencapaian target IKLI. Sementara untuk mendukung capaian target IKLH program yang disiapkan adalah Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dan Program Pengelolaan Persampahan.

Selain mendukung pencapaian target IKLH, pada keempat program tersebut juga diarahkan untuk mendukung capaian target Kebijakan Nasional pada Urusan Lingkungan Hidup yang mencakup peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan pembangunan rendah karbon.

Sasaran selanjutnya yang dikembangkan dari visi misi Walikota adalah Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Sasaran ini ditindaklanjuti oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup melalui Program Pengendalian

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan prioritas utamanya adalah pembinaan pengelolaan Limbah B3 untuk fasyankes.

Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan. Sasaran ini dirindaklanjuti oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup melalui Program Pengembangan Perumahan dan Program Kawasan Permukiman dengan prioritas utamanya adalah rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini sekaligus juga mendukung tujuan 1 dari SDGs/TPB yaitu tanpa kemiskinan.

Secara keseluruhan, jumlah program yang diajukan dalam Renja 2023 adalah sebanyak 11 program yang terdiri dari 1 program rutin kesekretariatan, 3 program teknis urusan perumahan rakyat dan 8 program yang terkait urusan lingkungan hidup.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Adapun Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang untuk Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Kota Padang Panjang  
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
1 04		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>												
1 04 01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>												
1 04 01 2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>												
1 04 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu		90 %	37 Orang/bul	an100 %	4,095,191,064	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	4,095,191,064
1 04 01 2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>												
1 04 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		90 %	21 Paket	90 %	7,770,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	7,770,000
1 04 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		90 %	58 Paket 2 Unit	90 %	68,489,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	68,489,450
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah jenis barang cetakan Jumlah penggandaan yang disediakan	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		90 %	13 Jenis 9976 Lembar	90 %	16,130,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	16,130,750
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan Jumlah rapat - rapat koordinasi yang diikuti luar daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		90 %	1033 Ok 138 kali	90 %	302,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	302,660,000
1 04 01 2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah jenis tagihan rekening yang dibayarkan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		90 %	60 tagihan	100 %	51,532,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	51,532,000
1 04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		90 %	16 Orang	100 %	581,712,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	581,712,000
1 04 01 2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												
1 04 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase pemeliharaan BMD yang selesai dilaksanakan		90 %	4 Unit	90 %	32,724,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	32,724,000

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 04 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	Persentase pemeliharaan BMD yang selesai dilaksanakan		90 %	28 Unit	90 %	122,848,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	122,848,000
1 04 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan BMD yang selesai dilaksanakan		90 %	6 Jenis	90 %	25,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	25,870,000
1 04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemeliharaan BMD yang selesai dilaksanakan		90 %	2 Unit	90 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	50,000,000
1 04 02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>								359,904,780					359,904,780
1 04 02 2.03	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>								104,000,000					104,000,000
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Jumlah rumah korban bencana yang direhab dan di bangun		97,10 Persen	5 Unit Rumah	5 rumah	52,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Rumah Layak Huni	97,10 Persen	52,000,000
1 04 02 2.03 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah rumah korban bencana yang direhab dan di bangun		97,10 Persen	0 Unit Rumah 2 unit	5 rumah	52,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Rumah Layak Huni	97,10 Persen	52,000,000
1 04 02 2.05	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>								255,904,780					255,904,780
1 04 02 2.05 01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola	97,10 Persen	1 Laporan 6 Orang	72 hunian	255,904,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Rumah Layak Huni	97,10 Persen	255,904,780
1 04 03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>								1,125,118,166					1,125,118,166
1 04 03 2.03	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>								1,125,118,166					1,125,118,166
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase pengurangan kawasan kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah rumah yang direhab (APBD dan DAK)		40 %	118 Unit Rumah 25 Unit	43 unit	1,096,000,066	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengurangan kawasan kumuh	40 %	1,096,000,065
1 04 03 2.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase pengurangan kawasan kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah rumah yang direhab (APBD dan DAK)		40 %	1 Laporan	43 unit	29,118,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengurangan kawasan kumuh	40 %	29,118,100



Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 04 05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								3,146,907,043				256,907,000
1 04 05 2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								3,146,907,043				256,907,000
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard	Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman Jumlah lokasi permukiman yang dilengkapi dengan bangunan pengaman Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Jumlah ruas jalan lingkungan yang sesuai standar (dengan Perkerasan) Jumlah saluran drainase teknis (konstruksi beton)	Jumlah jenis PSU yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	2 Kecamatan 10 Lokasi 73 Lokasi 16 Lokasi 12 Lokasi	3 %	3,146,907,043	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard	91 %	256,907,000
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2 11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								11,145,051,591				11,153,145,440
2 11 02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								304,950,350				383,904,250
2 11 02 2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota								26,923,450				26,923,450
2 11 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	Jumlah dokumen DDDT yang direvisi Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, Jumlah dokumen DDDT yang direvisi		100 %	2 Dokumen 0 Dokumen	2 Dokumen	26,923,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100 %	26,923,450
2 11 02 2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota								278,026,900				356,980,800
2 11 02 2.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah dokumen KLHS Revisi RTRW, Jumlah KLHS Perubahan RPJMD		100 %	0 Dokumen	1 Dokumen	178,026,900			Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100 %	178,026,900
2 11 02 2.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah dokumen KLHS Revisi RTRW, Jumlah KLHS Perubahan RPJMD		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100 %	178,953,900
2 11 03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								354,620,390				354,620,390
2 11 03 2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								325,958,840				325,958,840
2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemaran ringan	Jumlah kampung iklim yang dibangun	Jumlah Kampung iklim yang dibangun		14,29 %	9 kampung	9 kampung	25,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemaran ringan	14,29 %	25,830,000
2 11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemaran ringan	Jenis hasil uji	Jumlah Kampung iklim yang dibangun		14,29 %	2 Jenis	9 kampung	300,128,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemaran ringan	14,29 %	300,128,840
2 11 03 2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								28,661,550				28,661,550
2 11 03 2.02 01	Pembentian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemaran ringan	Data kualitas lingkungan Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarannya	Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarannya		14,29 %	2 Data 1 Sungai	1 sungai	28,661,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemaran ringan	14,29 %	28,661,550

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								2,141,344,851				1,956,084,850
2 11 04	2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota								2,141,344,851				1,956,084,850
2 11 04	2.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Persentase ketersediaan dokumen KEHATI Persentase Ketersediaan RTH Publik	Jumlah dokumen profil Kehati, Jumlah Dokumen Rencana Pemanfaatan Keaneekaragaman Hayati, Jumlah dokumen Data Monitoring Keaneekaragaman Hayati		100 % 4.5 %	1 Dokumen	1 Dokumen	28,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan dokumen KEHATI Persentase Ketersediaan RTH Publik	100 % 4.5 %	28,060,000
2 11 04	2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase ketersediaan dokumen KEHATI Persentase Ketersediaan RTH Publik	Jumlah lokasi pembuatan taman Jumlah lokasi pemeliharaan taman Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		100 % 4.5 %	2 lokasi 4 Lokasi 47 Ha	1 Dokumen	2,113,284,851	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan dokumen KEHATI Persentase Ketersediaan RTH Publik	100 % 4.5 %	1,928,024,850
2 11 05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								9,095,000				9,095,000
2 11 05	2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								9,095,000				9,095,000
2 11 05	2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase pengelolaan limbah B3 fasyankes (jrh fasyankes yang mengelola limbah/penghasil limbah)	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) penghasil LB3 yang dibina		31- 35 Persen	10 lokasi	10 Fasyankes	9,095,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan limbah B3 fasyankes (jrh fasyankes yang mengelola limbah/penghasil limbah)	31-35 Persen	9,095,000
2 11 06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								18,822,000				18,822,000
2 11 06	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								18,822,000				18,822,000
2 11 06	2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat ketaatan penerapan izin lingkungan	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		65 %	25 Laporan	110 kegiatan	18,822,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat ketaatan penerapan izin lingkungan	65 %	18,822,000
Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								76,350,000				76,350,000
2 11 09	2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								76,350,000				76,350,000
2 11 09	2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah jenis penghargaan di bidang lingkungan hidup	Jumlah koordinasi adipura yang dilaksanakan Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH Jumlah sekolah Adiwiyata yang dibina		2 Jenis	3 Kali 1 Entitas 45 Sekolah	40 Sekolah	76,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah jenis penghargaan di bidang lingkungan hidup	2 Jenis	76,350,000

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								8,239,869,000				8,239,869,000
2 11 11 2.01		Pengelolaan Sampah								8,239,869,000				8,239,869,000
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Jumlah pekerja kebersihan Kota yang dipekerjakan	Jenis sarana prasarana persampahan		72 % 28 %	183 Orang	3 jenis	5,903,795,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	72 % 28 %	5,903,795,750
2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat	Jenis sarana prasarana persampahan		72 % 28 %	4 kali	3 jenis	19,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	72 % 28 %	19,640,000
2 11 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.	Jenis sarana prasarana persampahan		72 % 28 %	1 Dokumen 4 Jenis	3 jenis	1,562,383,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	72 % 28 %	1,562,383,250
2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Jumlah TPA yang dipelihara	Jenis sarana prasarana persampahan		72 % 28 %	1 TPA	3 jenis	754,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	72 % 28 %	754,050,000
<b>TOTAL</b>									<b>21,131,908,844</b>				<b>18,251,652,649</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi langkah awal bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Lingkungan Hidup. Dokumen ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan APBD dan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang.

Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2023 berpedoman kepada Perubahan Renstra 2018-2023. Selain itu Renja Tahun 2023 telah secara penuh menerapkan klasifikasi dan nomenklatur baru sesuai ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2023 selain berisi program, rencana kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan, indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian rencana kerja yang telah disusun sebelumnya.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Lingkungan Hidup.

Padang Panjang, Juli 2022

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**



**ALVI SENA, ST, MT**  
**NIP. 19750825 200212 1 004**